

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Hizbut Tahrir Indonesia adalah sebuah gerakan partai politik berbasis Islam. Mereka mencita-citakan untuk membangun sistem khilafah *Islamiyah* di semua negara. Tentu saja dengan Konsep transnasional tidak memandang adanya negara-bangsa dan kepemimpinan dunia yang dipegang oleh satu. Tujuannya ingin mempersatukan umat Islam di Dunia. Dari konsep dan pemahaman tentang khilafah Hizbut Tahrir sangat utopis dan tidak masuk akal. Bahkan Khilafah versi Hizbut Tahrir Indonesia menolak adanya sistem demokrasi. Hal inilah yang menjadi landasan Pak Joko Widodo dan kabinetnya membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia tanpa perlu musyawarah atau diskusi terlebih dahulu. Selain itu, pembubaran HTI memiliki kepentingan partai politik yang sedang berkuasa di lembaga Eksekutif dan Legislatif, yaitu partai Demokrat Indonesia Perjuangan, yang tidak menginginkan negara Islam. Hizbut Tahrir Indonesia dianggap oleh sebagian rezim merupakan kelompok radikal dan ladang terorisme. Padahal, jika menelusuri gerakan *Hizbut tahrir Indonesia*, itu adalah bentuk anarkisme. Anarkis adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk menyetujui keberadaan negara, sehingga mereka secara tegas dan aktif menolak keberadaan negara (Wolf, 2009). Menurut pakar antropologi David Graeber, kelompok anarkisme tidak akan bergantung pada pemerintah untuk hidup mereka. Inilah yang terjadi pada kelompok Hizbut Tahrir yang menolak keberadaan sebuah negara-bangsa.

Khilafah memang menjadi bagian dari Islam. Namun, Khilafah yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia berbeda dengan khilafah yang dipandang oleh kaum sunni, organisasi masyarakat Islam dan partai Islam di Indonesia. Bahkan jejak Khilafah Indonesia secara empiris dipengaruhi langsung oleh kesultanan Utsmaniyah yang hancur pada tahun 1924 M. Tentu saja ada perbedaan persepsi tentang khilafah di Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia secara hukum tidak bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, narasi seperti itu bisa jadi merupakan pola atau permainan

politik yang dilakukan oleh Hizbut tahrir Indonesia yang ingin menggantikan Pancasila dan Undang-undang. Karena Hizbut Tahrir Indonesia menolak pemilihan pemimpin dari hasil sistem demokrasi yang dianggap menyengsarakan rakyat Indonesia dan hukum tertinggi didasarkan pada wakil rakyat, bukan Tuhan (Allah Subhanahu Wata'ala). Dan itu tidak lepas dari pengaruh sejarah imperialisme, dimana keberadaan orang barat (eropa) merusak cendekiawan anak muda Islam dari ilmu pengetahuan, teknologi, busana, senjata, sehingga runtuhnya kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1924 M dianggap sebagai hari kesedihan umat Islam di seluruh dunia. Inilah sebab dan akibat mengapa Hizbut Tahrir Indonesia yang berpaham khilafah sangat berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan khilafah dipandang oleh Hizbut Tahrir Indonesia berbeda dengan partai Islam dan kalangan Sunni.

Bagi organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, mereka memandang Khilafah tidak bisa lagi dijalankan untuk masa kini, khilafah bisa dijalankan pada masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Abbasiyah. Jika Hizbut Tahrir Indonesia ingin mengembalikan sistem pemerintahan ke zaman Nabi Muhammad dan menegakkan Khilafah di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menjadi representatif dari Khilafah di zaman Modern atau masa kini. Sedangkan wujud Pancasila merupakan representatif dari Piagam Madinah dengan melalui jalur konvensi antar kemajemukan umat manusia yang beraneka ragam budaya, etnis, ras, dan Agama. Menurut profesor Mahfud Md, diksi khilafah adalah bahasa arab, sedangkan bahasa Indonesia adalah khilafah merupakan pemerintahan. Dan pancasila tidak akan menghilangkan nilai-nilai syariah. Jadi jika hizbut tahrir Indonesia ingin menegakkan bahwa syariah Islam itu *kaffah* di Indonesia, tidak perlu lagi menyebut kata syariah, karena masyarakat Indonesia sudah bersyariah/khilafah (MD, 2019).

## 6.2 Saran

Pak Joko Widodo dalam kepemimpinan harus memiliki sikap ketegasan dalam mengambil sikap politik dalam bernegara. Namun, pak Joko Widodo dan jajarannya sebelum membubarkan Organisasi Masyarakat haruslah berdiskusi dan berkomunikasi secara persuasif di Istana terlebih dahulu, guna memberikan

pemahaman atau sosialisasi organisasi masyarakat (HTI) bahwa NKRI dan Pancasila merupakan representasi dari khilafah. Kondisi seperti ini akan menimbulkan persepsi publik yang beranggapan bahwa pemerintah era pak Joko Widodo anti terhadap Islam, anti kritik dan anti demokrasi kepada masyarakat (diutarakan oleh Profesor Yusril dalam wawancara). Bahkan era HTI akan semakin bergelora untuk mengkampanyekan khilafah jika gerakan ini dibubarkan. Negara Indonesia telah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul dan berserikat yang tertuang dalam konstitusi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik .

Para ulama kontemporer telah sepakat bahwa negara Pancasila adalah negara Islam. Nadhlatul Ulama menyebutkan sebagai *Dar al-Sulh* (wilayah perdamaian) dan Muhammadiyah menyebutkan sebagai *Dar al-Ahd wa syahadah* (wilayah kesepakatan dan kesaksian). Karena bentuk negara Islami bisa berubah-ubah, seperti monarki, demokrasi atau parlementer. Hal terpenting bagi suatu negara adalah mengamalkan dan menghormati nilai-nilai seperti keberagaman, kebebasan, persatuan, kemanusiaan dan keadilan.

Ketika orang-orang yang ingin menerapkan syariat Islam secara menyeluruh digunakan dalam sistem Indonesia. harus menempuh jalur partai politik dengan menggunakan sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Sehingga dapat menerapkan syariat Islam dalam kebijakan politiknya. Karena dengan jalur ini akan terasa aman, sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Manusia tidak pernah seragam. Karena manusia memiliki pemikiran dan referensi yang beragam dan berbeda. Jadi jika semua hal atau perkara harus sama dalam berpikir, itu tidak masalah. Meskipun demikian, manusia dapat terwujud jika ada konvensi-konvensi yang menghasilkan hukum. Manusia melanggar hukum, karena tidak dilibatkan dalam dialog dan sosialisasi.